



## Ketua RT hingga Penggerak PKK Diberi Honor

### Mulai Januari Tahun Depan

**JOGJA, Jawa Pos** - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja berencana memberikan honor kepada warga pelayan masyarakat di kota. Yaitu, mulai ketua RT/RW, ketua pengurus kampung, ketua LPMK, hingga ketua tim penggerak PKK dari kecamatan sampai RT.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jogja Octo Noor Arafat mengatakan, dasar hukum pemberian honor telah diatur dalam

Peraturan Wali Kota No 72/2019 yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Tujuannya, mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas warga pelayan masyarakat. "Ini untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada warga pelayan masyarakat," kata Octo.

Octo menjelaskan, pihaknya belum bisa menyebutkan secara pasti nilai honorarium yang bakal diberikan kepada setiap warga pelayan masyarakat itu. Sebab, hal itu masih dibahas melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). "Teman-teman dari TAPD nanti yang menyusun

dan menunggu evaluasi dari gubernur," ujarnya.

Meski kebijakan sudah tertuang dalam perwali, besaran honor yang akan diberikan masih dibahas oleh TAPD Kota Jogja. Meski demikian, Octo memastikan bahwa besaran honorarium bagi warga pelayan masyarakat itu tidak akan membebani APBD Kota Jogja. Sebab, nilainya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Kalau penentuan besaran honor sudah oke, nanti kami buat keputusan wali kota terkait penetapan besaran honorarium," tandasnya.

Honorarium itu tidak akan diberikan tiap bulan, tetapi dua kali dalam setahun atau bisa diberikan tiap semester.

Pemberian honorarium bagi warga pelayan masyarakat itu baru pertama akan dilakukannya. Sebelumnya di kabupaten lain, yakni Kulon Progo dan Sleman, pemberian honor tersebut sudah dilakukan kepada ketua RW. Pemberian honor itu sudah sesuai dengan Perda DJ tentang Pelayanan Publik. "Ini memang hak mereka untuk mendapatkan apresiasi," imbuhnya.

Ketua RT 26 Nagan Kidul, Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton, Rohmat Hajir menyambut baik rencana pemkot. Dia mengatakan, selama ini dirinya bekerja sebatas pengabdian kepada masyarakat. "Saya *nggak ngarani* mau berapanya. Tapi, kalau ada, *yuz* kita terima saja," ungkapny.

Kendati demikian, lanjut dia, terpenting sebagai warga pelayan masyarakat dirinya merasa diapresiasi oleh penentu kebijakan. "Selama ini *kan* kalau bagus pada diam. Tapi, kalau *nggak* bagus atau keliru sedikit, ada suara," tambahnya. (cr15/c4/ami)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005